



sinarmas multiartha

SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Day/Date : Monday, 28 October 2024

Time : 10.11 a.m. West Indonesian Time (WIB) – 10.23 a.m. West Indonesian Time (WIB)

Venue : Sinar Mas Land Plaza Tower II 39th Fl,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Attendance : Board of Commissioners :

1.	Fuganto Widjaja*	President Commissioner
2.	Robinson Simbolon	Independent Commissioner
3.	Ketut Sanjaya	Independent Commissioner

Board of Directors :

1.	Burhanuddin Abdullah	President Director
2.	Agus Leman Gunawan	Director
3.	Ferita	Director
4.	Felix	Director
5.	Lili Wijata	Director

- The Shareholders : 4,691,982,309 shares (73.6845%) of total shares
6,367,664,717.

**) attend via zoom meeting*

I. MEETING AGENDA

Approval of changes to the Company's data regarding changes to the composition and of the Board of Directors and Board of Commissioners;

II. COMPLIANCE WITH LEGAL PROCEDURES OF THE MEETING ORGANIZATION

1. In order to comply with Financial Services Authority (OJK) Regulation 15 of 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as (“POJK 15”)), the Board of Directors has submitted a notification regarding the planned implementation of the Meeting to OJK via letter dated 26 August 2024 No.: 139/SMMA/VIII/2024;
2. The ANNOUNCEMENT advertising to the Shareholders regarding the planned organization of this Meeting in “Investor Daily” newspaper, Indonesian Stock Exchange website, OJK website, and the Company’s official website of www.smma.co.id which were entirely done on 19 September 2024.
3. INVITATION to the Shareholders to attend the Meeting also has been carried out by posting an advertising in “Investor Daily” newspaper, Indonesian Stock Exchange website, OJK website, and the Company’s official website of www.smma.co.id which were entirely done on 4 October 2024.

III. RESOLUTION OF THE MEETING

MEETING AGENDA

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the Meeting Agenda.
- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. the Shareholders and/or their proxies who abstained were 356,500 shares or 0.0078% of the total valid shares present at the Meeting;
 - b. the Shareholders and/or their proxies who disagree were 278,852 shares or 0.0059% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. the Shareholders and/or their proxies who agreed were 4,691,703,457 shares or 99.9941% of the total valid shares present at the Meeting.

Therefore, the proposed decision for the First Agenda of the Meeting was approved by majority vote.

- **Resolutions of the Meeting Agenda are as follows:**
 - a. Approved the resignation of Mr. Dani Lihardja as a Commissioner of the Company by expressing our gratitude for all the services he has provided so far to the Company, then providing full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) for the supervisory actions in accordance with his position carried out so far, as long as these actions are reflected in the Company's books.
 - b. And agreed to appoint Mr. Ir. Dumoly Freddy Pardede as the new Director of the Company.

Starting from the closing of this Meeting, therefore, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja

Independent Commissioner : Mr. Robinson Simbolon

Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya

Board of Directors :

President Director : Mr. Burhanuddin Abdullah

Director : Mr. Agus Leman Gunawan

Director : Mr. Felix

Director : Mrs. Ferita

Director : Mrs. Lili Wijata

Director : Mr. Ir. Dumoly Freddy Pardede

Approved to grant the power and authority to the Board of Directors severally or collectively with the right of substitution to enforce resolutions of the Meeting, including but not limited to re-state the resolutions in the notarial deed, make or have any required deeds, letters, or documents made, appear before the competent party/official to notify the same to the relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to make the registration or the announcement under prevailing laws and regulations, one and another without any exception.

The resolutions of the Meeting mentioned above are stated in the Deed of Minutes of the Meeting dated 28 October 2024, No. 34 drawn up before Aulia Taufani, SH, Notary in Jakarta.

Jakarta, 29 October 2024
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Board of Directors

Underground Economy Hambat Penerimaan Negara

JAKARTA, ID – Maraknya porsi ekonomi bawah tanah (*underground economy*) menghambat upaya pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja optimal untuk mengatasi dampak dari *underground economy*.

Oleh Arnoldus Kristianus

Ekonomi bawah tanah adalah transaksi barang atau jasa yang tidak dilaporkan kepada pemerintah dan karenanya berada di luar jangkauan pemungutan pajak dan regulator. Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45) Reyhan Noor mengatakan, aktivitas ilegal yang tidak hanya melanggar hukum tetapi merugikan pengguna yakni judi *online* (judi). Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama semester I-2024 ada transaksi judi sebesar Rp 174 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan hukum justru membuat dampak ekonomi yang lebih signifikan. Misalnya, penelanaan daya beli karena pengalihan digunakan untuk judi. Hasilnya juga akan berdampak terhadap perkembangan manusia terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

"Biaya ekonomi yang cukup tinggi dari *underground economy* juga terlihat dari rasio penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (*taxratio*) yang stagnan dalam 10 tahun terakhir. Alhasil, kapasitas fiskal semakin terbatas untuk implementasi program pemerintah yang dapat memberikan efek berganda lebih tinggi," ucap Keyhan sebagai *Investor Daily*, Senin (28/10/2024).

Dia mengatakan bahwa celah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi *shadow economy*. Salah satunya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Berdasarkan kajian LAB 45, PRT yang terlindungi akan otomatis terdaftar sehingga bisa memiliki efek ganda seperti yang didapat dari kepesertaan jaminan sosial.

Menurut dia, PRT yang diakui oleh negara dan dilindungi hukum akan lebih terlihat kehadiran dan keberlangsungan kerjanya, bahkan akan memiliki dana pensiun. PRT juga memainkan peran utama yang menyokong ekonomi keluarga urban karena para pekerja dapat menipiskan anak dan pekerjaan rumahnya sehingga dapat berkontribusi kepada ekonomi, terutama dampak positifnya terhadap keterlibatan perempuan yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja.

Upaya pemerintah sudah cukup banyak untuk melegalkan RUU PPRT yang telah mangkrak selama 20 tahun. Namun, upaya ini perlu ditingkatkan dengan konsolidasi politik di parlemen," terang Reyhan.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengimbau agar aparat pajak bekerja lebih keras dalam mengumpulkan penerimaan pajak, yang seharusnya bisa didapatkan dari sektor-sektor yang terkait dengan *underground economy*. Salah satu sektor yang terkait dengan *underground economy* adalah judi *online*.

Menurut dia, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau *online betting*, misalnya melakukan taruhan tentang soal skor sepak bola dalam pertandingan klub-klub liga Inggris, maupun judi-judi dalam bentuk lainnya. "Sudah enggak kena denda, enggak tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau

Penerimaan Pajak 1 Jan – 31 Agustus 2024



dia dapat *winning* itu kan nambah PPH (Pajak Penghasilan)," ucap Anggito dalam Puncak Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2024, Senin (28/10/2024). Dalam hal ini petugas pajak harus bisa bekerja lebih lihai agar bisa meraup penerimaan pajak lebih besar. Apalagi target pajak terus meningkat setiap tahunnya. "Jadi teman-teman pajak mesti pintar itu, untuk mencari tambahan *super income* yang berasal dari *underground economy*," kata Anggito.

Selain itu *underground economy* juga terjadi dari permainan senda daring. Hal-hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara. "Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak *underground economy* yang tidak *re-register*, tidak *report*, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ucap dia.

Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus melakukan *monitoring* terhadap kondisi *underground economy*. Terutama dalam upaya pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara. "Ya kita kan mengharapakan tidak ada lagi *shadow economy*, kan semakin resmi semakin bagus, karena itu dari segi perpajakan dan

lain akan termonitor," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan pada Senin (28/10/2024) malam.

Disisi lain, pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, mengatasi *underground economy* terkait perkebunan tanpa izin, pertambangan ilegal, *illegal logging*, hingga judi *online* maka menjadi ranah penegak hukum. Sedangkan yang terkait dengan sektor legal yang selama ini tidak tercatat maka dapat diatasi oleh pihak ketiga melalui instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (LLAP).

"Semakin marak di era digitalisasi. Maknanya data di platform digital itu penting. Dan satu saja sudah dilakukan. Digitalisasi pembayaran bisa menjadi kunci mengatasi *underground production*. Hanya saja terbatas untuk transaksi B2C (*business to customer*)," tutur Fajry. Dia mengatakan, untuk memajaki sektor tak berizin seperti sawit ilegal, tambang ilegal, *illegal logging*, dan sejenisnya, otoritas pajak tidak bisa maju sendiri tetapi harus bersinergi bersama aparat penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum seharusnya melakukan pembenahan dulu.



Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kelima kiri), Pj Gubernur Aceh Safritza (kelima kanan) dan Deputi Komisiner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK Defri Andri (keempat kiri) berboto bersama perwakilan asosiasi perbankan dan perwakilan pemerintah saat peluncuran buku Pedoman Produk Perbankan Syariah dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh, Aceh, baru-baru ini. Pertemuan tahunan yang digelar OJK tersebut mengangkat tema Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar industri perbankan syariah, regulator dan unsur terkait lainnya dalam rangka pengembangan ekonomi keuangan syariah baik di nasional maupun internasional.

BPK: Kerugian pada Pemda dan BUMD Rp 4,01 Triliun

JAKARTA, ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode tahun 2005 hingga semester I-2024, dengan status yang telah ditetapkan pemerintah daerah (pemda) dan badan usaha milik daerah (BUMD) mencapai Rp 4,01 triliun. "Atas kerugian pada pemda dan BUMD, telah dilakukan pelunasan sebesar Rp 1,54 triliun, dalam proses angsuran Rp 987,58 miliar, dan penghapusan Rp 27,42 miliar," ujar Ketua BPK Isma Yatus saat menyampaikan Khtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), di Jakarta, Senin (28/10/2024). Dengan demikian, kata dia, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp 1,45 triliun atau 36,21% dari

total kasus kerugian daerah yang telah ditetapkan. IHPS I-2024 juga mencatatkan 603.258 rekomendasi BPK yang diberikan kepada pemda dan BUMD sepanjang 2005 hingga semester I-2024, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 78,4%. Pemda dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang tertinggi, antara lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati 99,45%, Pemkab Sukoharjo 99,42%, dan Pemkab Sragen 99,28%. "Kami mengapresiasi komitmen kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan pada DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) sebagai representasi daerah, agar mengoptimalkan peranannya dalam pengawasan, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya

tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel," jelas dia. Pada 2023, dinyatakan pula bahwa sebanyak 16 pemda berhasil meningkatkan opini dari Wajar Dengan Pengawasan (WDP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengawasan (WTJ) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Pihaknya mengapresiasi upaya 16 pemda yang telah mampu meningkatkan opini LKPD. Upaya yang telah dilakukan oleh pemda tersebut, antara lain melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran, meningkatkan pengawasan dan ketepatan verifikasi, melakukan pencairan belanja sesuai dengan peruntukan, serta melakukan perbaikan dalam proses penganggaran dan manajemen penyelesaian program atau kegiatan yang dibayai dari dana yang telah ditetapkan pengunaannya. (th/ant)

sinarmas multiartha

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Hari/Tanggal: Senin, 28 Oktober 2024
Waktu: 10.11 WIB - 10.23 WIB
Tempat: Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Kehadiran: Dewan Komisaris: 1. Eragmo Widjaja*)
2. Rebohan Simbolon
3. Ketut Sanjaya
Direksi: 1. Burhanuddin Abahalla
2. Agus Lestari Gunawan
3. Feris
4. Felix
5. Lili Wijaya
Pemerang Saham: 4.691.982.309 saham (73,6845%) dari total saham 6.367.664.717
*hadir melalui zoom meeting

I. MATA ACARA RAPAT: Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

II. PENUHATAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYLENGGARAAN RAPAT: 1. Usul mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15") Direksi telah menyampaikan permohonan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 26 Agustus 2024 Nomor: 138/SMA-VIII/2024. 2. Hasil PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat ini, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, serta website resmi Perseroan yaitu www.sinarmas.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024. 3. PENGANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat juga telah dilakukan, yaitu dengan menggunakan bilah pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.sinarmas.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024.

III. KESIMPULAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT: 1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. 2. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. 4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebagai berikut: a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebagai berikut: 365.500 saham atau sebesar 0,0078% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak: 278.812 saham atau sebesar 0,0059% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebagai berikut: 4.691.703.457 saham atau sebesar 99,9941% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 5. Mata acara pertemuan untuk Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak. 6. Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: a. Menyetujui pengangkatan Dr. Bapak Danil Laksana sebagai Komisaris Perseroan dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaga yang dimiliki dan/atau dimiliki bersama dengan keluarga dan/atau orang-orang yang berkepentingan kepadanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Perseroan, selanjutnya memberikan persetujuan (voluntarily offer) di charge atas tindakan pengawasannya sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sehubungan tindakan-andan tersebut tercantum dalam buku-buku Perseroan. b. Dan menyetujui pengangkatan Bapak Dr. Danang Freddy Pande sebagai Direktur Perseroan yang baru. Selanjutnya untuk selanjutnya terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Bapak Eragmo Widjaja; Komisaris Independen: Bapak Rebohan Simbolon; Komisaris Independen: Bapak Ketut Sanjaya. Direksi: Direktur Utama: Bapak Burhanuddin Abahalla; Direktur: Bapak Agus Lestari Gunawan; Direktur: Bapak Feris; Direktur: Bapak Felix; Direktur: Ibu Lili Wijaya; Komisaris: Bapak Dr. Danang Freddy Pande

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencairkan kembali kepanasan tersebut dalam aksi nyata, membuat atau memuat dokumen sebagai akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, baik dibenarkan pihak-pihak yang berwenang untuk menandatangani hal tersebut kepada inspeksi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Dalam dan Luar Negeri Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pendaftaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dan lain-lain yang ada yang dikaitkan. Keputusan Rapat tersebut di atas dimungulkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Oktober 2024, Nomor 34 yang dibuat oleh Anita Tantiyah, SH, Notaris di Jakarta.

Jakarta, 29 Oktober 2024
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan

sinarmas

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK SINARMAS Tbk.

Direksi PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Senin, 28 Oktober 2024
Waktu: 10.45 - 11.00 WIB
Tempat: Ruang Danaromas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Kehadiran: Dewan Komisaris: 1. Tjendjowidjo Widjaja*)
2. Sammy Yustianingjaya
Direksi: 1. Freddy Tirtowidjaya
2. Miklo Andijaya
3. Edojaya Ongny Putra
4. Ferry Komal
5. Senny
Pemerang Saham: 15.819.156.029 saham (80,2345%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 19.716.127.403 saham

I. MATA ACARA RAPAT: 1. Susunan Pengurus Perseroan

II. PENUHATAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYLENGGARAAN RAPAT: 1. Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat tanggal 3 September 2024 Nomor SKL 199/2024/PRESIDIR. 2. Mempublikasikan PENGUMUMAN Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 19 September 2024 dan Mempublikasikan PEMANGGILAN Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 4 Oktober 2024, masing-masing melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Investor Daily Indonesia", situs web Kantor Pusat Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs resmi Perseroan.

III. KESIMPULAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT: 1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. 2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. 3. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. 4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju atau tidak setuju dari atau tidak hadir dalam Rapat; c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 15.819.129.229 saham atau merupakan 99,9989% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstrah dianggap mengakhiri suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 15.819.156.029 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. 2. Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui pengangkatan Sdr. Amandala Johannes sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat yaitu pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Dengan demikian sejak ditetapkannya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI: Direktur Utama: Freddy Tirtowidjaya; Direktur: Miklo Andijaya; Direktur: Edojaya Ongny Putra; Direktur: Ferry Komal; Direktur: Senny; Komisaris: Amadilla Johannes. DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama: Tjendjowidjo Widjaja; Komisaris Independen: Sammy Yustianingjaya; Komisaris Independen: Rusmin

2. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani atau penyampaian keputusan rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak/antarm yang berwenang.

Jakarta, 29 Oktober 2024
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 28 Oktober 2024

Nomor : 26/X/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kepada Yth:
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
di Menara Tekno, Lantai 7,
Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Sinar Mas Multiartha Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
Waktu : 10.11 WIB – 10.23 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Kehadiran : - Dewan Komisaris	:	1. Fuganto Widjaja*)	Komisaris Utama
		2. Robinson Simbolon	Komisaris Independen
		3. Ketut Sanjaya	Komisaris Independen
- Direksi	:	1. Burhanuddin Abdullah	Direktur Utama
		2. Agus Leman Gunawan	Direktur
		3. Ferita	Direktur
		4. Felix	Direktur
		5. Lili Wijata	Direktur
- Pemegang Saham	:	4.691.982.309 saham (73,6845%)	dari total saham 6.367.664.717.

**)hadir melalui zoom meeting*

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan perubahan data Perseroan tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ("POJK 15")) Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 26 Agustus 2024 Nomor: 139/SMMA/VIII/2024;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

2. Iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat ini, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan memasang iklan pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 365.500 saham atau sebesar 0,0078% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 278.852 saham atau sebesar 0,0059% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.691.703.457 saham atau sebesar 99,9941% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 - a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dani Lihardja selaku Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
 - b. Dan menyetujui mengangkat Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede selaku Direktur Perseroan yang baru.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Fuganto Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Burhanuddin Abdullah
Direktur : Bapak Agus Leman Gunawan
Direktur : Bapak Felix
Direktur : Ibu Ferita
Direktur : Ibu Lili Wijata
Direktur : Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Oktober 2024, Nomor 34 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

